

SEJUMLAH ARTIS IKUT MAJU

Parpol Hanya Bisa Dukung Satu Paslon

JAKARTA (KR) - Ketua Divisi Teknis Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Idham Holik menegaskan, partai politik (parpol) atau gabungan parpol hanya dapat memberikan dukungan kepada satu bakal pasangan calon dan tidak bisa ditarik setelah melakukan pendaftaran.

"Berdasarkan Pasal 40 ayat 4 UU No 10 tahun 2016, parpol atau gabungan parpol hanya dapat mengusulkan satu pasangan calon," kata Idham di Sorong Papua Barat Daya, Kamis (29/8).

Menurutnya, aturan tersebut juga dipertegas dengan peraturan KPU No 8 tahun 2024 yang menyatakan, parpol peserta pemilu atau gabungan yang telah mendaftarkan pasangan ke KPU provinsi atau kota tidak dapat menarik pengusulnya sejak pendaftaran. Ia menjelaskan, dengan aturan tersebut dapat dipastikan untuk parpol yang akan menarik dukungan dan mendukung pasangan calon lainnya tidak akan dihitung oleh KPU.

"Aturan demikian pendaftaran hanya sekali. Tidak ada sanksi jika

menarik pengusulan atau pendaftaran calon yang telah didaftarkan dan parpol tersebut dianggap mengusulkan pasangan calon yang bersangkutan dan tidak dapat mengusulkan calon atau pasangan calon pengganti," tuturnya.

Ketika ditanya terkait pencalonan di DKI Jakarta, Idham memastikan, sudah semua parpol memberikan dukungan kepada pasangan calon, jadi dipastikan tidak dapat ditarik.

Dengan demikian, peluang Anies Baswedan untuk mengikuti Pilkada Jakarta sudah tertutup karena tiga parpol yang tersisa tidak akan mencukupi persyaratan kalau berniat mengusulnya. Sedangkan untuk menarik partai lain tidak memungkinkan.

Pernyataan Idham Holik itu sekaligus menanggapi Partai Buruh yang kemarin masih membuka peluang untuk membentuk koalisi baru demi mengusul Anies Baswedan sebagai bakal calon gubernur di Pilkada Jakarta 2024.

Sementara itu, selain Rano Karno, ternyata terdapat sejumlah selebritas

yang ikut mengadu nasib mencalonkan diri menjadi calon kepala daerah dan wakil kepala daerah, diantaranya Gilang Dirga yang dikenal sebagai komedian dan presenter yang maju dalam Pilkada Kabupaten Bandung Barat. Ia menjadi calon wakil bupati mendampingi Didik Agus T yang diusung Partai Demokrat dan PKS. Kemudian penyanyi Jeje Govinda bersama Partai Gerindra juga di Pilkada Bandung Barat.

Artis lain yang akhirnya maju di pilkada adalah penyanyi Kris Dayanti. Ia resmi maju dalam Pilkada Kota Batu 2024 menjadi calon walikota didampingi oleh Kresna Dewanata Phrosakh sebagai calon wakil walikota. Keduanya diusung PDIP dan Partai NasDem.

Sedangkan, penyanyi Vicky Shu memastikan diri maju dalam Pilkada Kabupaten Cilacap 2024 sebagai calon wakil bupati mendampingi Awaluddin Muiri. Keduanya diusung oleh Partai Gerindra, Partai NasDem dan PPP.

(Ant/Obi)-f



KR-Surya Adi Lesmana

OJOL TUNTUT REGULASI TARIF: Pengemudi ojek online (ojol) konvoi melewati Tugu Pal Putih Yogyakarta untuk berunjuk rasa, Kamis (29/8/2024). Mereka menuntut adanya regulasi baru soal tarif angkutan penumpang dan layanan antar makanan serta barang di wilayah setempat, karena tarif yang berlaku saat ini dianggap terlalu murah.

GELAR AKSI DI KANTOR GUBERNUR

Pemda DIY Siap Jembatani Aspirasi Ojol

YOGYA (KR) - Ratusan pengemudi ojek online (ojol) yang tergabung dalam Forum Ojol Yogyakarta Bergerak (FOYB) melakukan aksi unjuk rasa di depan Kantor Gubernur DIY, Kepatihan, Yogyakarta, Kamis (29/8).

Aksi dilakukan dengan konvoi dari Stadion Kridosono menuju Titik Nol Kilometer dan Kompleks Pemda DIY, Kepatihan. Mereka tiba di Kepatihan sekitar pukul 11.00 WIB. Selain menyampaikan sejumlah tuntutan dan menggelar spanduk, peserta aksi juga ingin bertemu langsung dengan Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X.

"Saat ini sesuai regulasi, untuk tarif minimum tentunya jika jarak antar di bawah 4 km maka ojol berhak menerima upah Rp 8.000/trip bersih. Kami menuntut tarif minimum Rp 9.000/trip atau Rp 10.000/trip di bawah 4 km. Selain itu potongan aplikasi yang sebelumnya sebesar 20 persen, pada aturan diubah kembali menjadi 15 persen seperti aturan terdahulu di Keputusan Menteri Perhubungan RI No KP 667/2022," kata Koordinator Aksi Sapto Pajo.

Menurut Sapto, pihaknya telah membuat kajian tuntutan. Hal inilah yang mendasari mereka untuk bertemu langsung Gubernur DIY, agar meneruskan kajian tersebut ke kementerian terkait. Tuntutan yang mereka inginkan adalah kenaikan tarif layanan penumpang dan adanya regulasi yang lebih jelas untuk layanan pengiriman makanan dan barang.

FOYB juga menuntut hadirnya regulasi layanan makanan dan barang. Karena saat ini regulasi tarif makanan dan barang belum

ada, sehingga terjadi persaingan bisnis yang tidak sehat antaraplikator dengan memberikan tarif rendah atas biaya jasa antar makanan dan barang.

"Mereka bebas menentukan tarif berapa pun. Shopee Food sampai sekarang bertahan di angka Rp 6.400 dengan program Hub, Grab juga Rp 6.400 dengan program Slot, bahkan GOJEK memberi tarif Rp 5.000 dengan program MJD. Ini tentu saja sangat merugikan driver selain karena minimnya pendapatan, driver juga otomatis membutuhkan waktu yang lebih lama untuk mencapai target pendapatan harian," paparnya.

Aksi ojol itu diterima Sekretaris Daerah (Sekda) DIY Beny Suharsono. Sekitar 12 orang perwakilan ojol juga berdialog di Gandok Kiwo, Kepatihan. Dalam dialog tersebut Pemda DIY akan membantu mengawal para ojol menyampaikan tuntutan hingga ke pusat (kementerian).

"Ada dua hal yang disepakati. Kalau mereka akan ke Jakarta tentu akan kita fasilitasi, karena tuntutan mereka itu kewenangannya ada di Pemerintah Pusat. Kami pun tidak bisa bergerak karena itu di bawah regulasi dari Pemerintah Pusat, tapi aspirasinya ke Pak Gubernur kami terima. Administrasi itu tidak berhenti, semua berproses dan sudah ada hierarkinya. Kita juga sudah mengungkap mereka yang membidangi," jelas Beny.

Beny menambahkan, soal keinginan mereka bertemu langsung dengan Sultan HB X, pihaknya akan mengatur pertemuan itu dan berkomunikasi dengan Sultan HB X.

(Ria)-f

Maju

Pihaknya percaya pasangan calon ini memenuhi persyaratan dan ditetapkan sebagai calon pada 22 September.

"Kami akan bergerak di 2535 RT, 600-an RW, semua kita akan kami sapa. Kami akan bergerak," tandas Eko rencana mengenalkan pasangan yang di usung partainya.

Kinerja

persen dengan rasio NPL coverage berada pada level yang memadai sebesar 211,60 persen," ujar Sunarso.

Dari sisi pendanaan, Dana Pihak Ketiga (DPK) BRI tercatat tumbuh 11,61 persen yoy menjadi Rp 1.389,66 triliun. Dimana dana murah atau CASA (Tabungan dan Giro) masih mendominasi struktur DPK BRI, dimana porsi CASA mencapai 63,17 persen dari total DPK BRI.

Melayani Masyarakat Lebih Luas dengan Konsep Hybrid Bank

Sunarso menambahkan, BRI terus berkomitmen untuk melayani seluruh lapisan masyarakat direalisasikan melalui strategi hybrid bank, di antaranya dengan adanya AgenBRILink dan super app BRImo. "Hingga akhir Juli 2024, BRI telah memiliki lebih dari 1 juta AgenBRILink yang tersebar di 62.000 desa. Jumlah tersebut tercatat telah meng-cover lebih dari 80 persen dari total desa di Indonesia.

Cukai

olahan siap saji (fastfood), hingga tisus.

Tidak berhenti sampai di situ, MSG (monosodium glutamat), batubara, hingga deterjen juga masuk dalam daftar potensial barang kena cukai.

Hasrat men-diversifikasi objek cukai baru terus menggelayut. Pengenaan cukai akan menyasar pula pada jasa, seperti telepon pintar (smartphone), pertunjukan hiburan, dan konser musik. Tak ketinggalan, hobi-hobi orang kaya, termasuk olah raga golf, pun tidak lepas dari radar pantauan calon jasa terkena cukai.

Pengenaan cukai atas barang/jasa nisya memiliki efek ekonomi yang tidak ringan.

Apabila pemerintah benar-benar memungut cukai atas sejumlah produk tersebut, akan berdampak pada kenaikan harga yang harus ditanggung oleh konsumen. Jelasnya, pungutan cukai akan merecoki daya beli masyarakat.

Sebagai sebuah kebijakan publik, pengenaan cukai terhadap objek tertentu harus didahului dengan naskah akademis yang membuktikan barang-barang tersebut mempunyai eksternalitas negatif. Dari daftar panjang di atas, tampaknya hanya MSG, batubara, dan deterjen yang layak

Adapun volume transaksi AgenBRILink selama Januari-Juli 2024 telah mencapai Rp 899 triliun," imbuh Sunarso.

Di sisi lain, perseroan juga terus memperkuat ekosistem super app BRImo. Hingga akhir Juli 2024 tercatat BRImo telah digunakan oleh lebih dari 35,2 juta user dengan volume transaksi mencapai Rp 2.574 triliun atau tumbuh 35,81 persen secara yoy.

Strategi Tumbuh Berkelanjutan Melalui Holding Ultra Mikro

BRI memiliki dua strategi untuk tumbuh secara berkelanjutan di masa mendatang. Strategi pertama, menaikkan nasabah eksisting dengan berbagai program pemberdayaan dan pendampingan. Strategi kedua mencari sumber pertumbuhan baru, dengan menyasar segmen ultra mikro melalui Holding Ultra Mikro (UMi) bersama Modalitas Nasional Madani (PNM) dan Pegadaian.

dikenakan cukai.

Sementara untuk barang lainnya, kriteria efek negatif kepada diri konsumen dan orang lain tidak terpenuhi.

Artinya, rencana penerapan cukai atas beberapa jenis barang/jasa di atas tidak sesuai dengan tujuan pengenaan cukai. Tujuan pengutan cukai toh untuk mengurangi konsumsi, alih-alih memperkuat keuangan negara.

Kemiripan cerita berlaku untuk hobi. Pertunjukan hiburan, konser musik, dan olah raga golf dicap sebagai hobinya orang kaya.

Atribut mewah dan eksklusif yang melekat pada hobi tersebut dianggap menimbulkan eksternalitas negatif berupa kecemburuan sosial. Dengan argumen itu, hobi tertentu patut menjadi basis pengenaan cukai.

Jika keadilan yang menjadi tujuan primer, pungutan lain berupa pajak, alih-alih cukai, tampaknya menjadi instrumen yang lebih efektif. Tarif progresif pajak penghasilan bagi pelaku hobi atau pajak pertambahan nilai terhadap alat perlengkapan hobi, misalnya, akan mengakomodasi kecemburuan sosial tadi.

Apapun alasannya, pungutan cukai

gunduran dirinya telah diterima dan berita acaranya dilampirkan dalam berkas pendaftaran. Termasuk terkait jabatan Bupati Kulonprogo yang pernah dijabatnya, Eko mengungkap bahwa hal tersebut masih serutur aturan perundangan.

Berita terkait Pilkada Kota Yogya di halaman 2.

Sambungan hal 1

Setelah 3 tahun terbentuk, Holding Ultra telah mengalami pertumbuhan luar biasa. Dimana hingga akhir Triwulan II-2024, Holding UMi telah berhasil melayani 176 juta nasabah simpanan dan mengintegrasikan lebih dari 36,1 juta nasabah peminjam dengan outstanding kredit dan pembiayaan mencapai Rp 622,3 triliun, atau tumbuh 7,7 persen secara yoy.

"Kontribusi PNM dan Pegadaian terhadap total pinjaman dan pembiayaan mikro BRI Group menjadi 20,3 persen atau meningkat dari sebelumnya 18,7 persen pada periode Triwulan II tahun lalu," ungkapnya.

"Dengan fundamental keuangan yang baik, serta kemampuan BRI melayani masyarakat yang semakin luas, ditambah adanya sumber pertumbuhan baru dari Holding Ultra Mikro, BRI optimistis dapat terus menorehkan kinerja positif dan berkelanjutan," pungkaskan Sunarso.

Sambungan hal 1

menjadi penerimaan pemerintah. Berbeda dengan pajak, alokasi belanja dari penerimaan cukai harus spesifik. Oleh karenanya, belanja yang didanai dari hasil penerimaan cukai hobi harus bisa dikembalikan kepada hal-hal yang terkait langsung dengan ekosistem hobi yang bersangkutan.

Dengan kaidah penerimaan-belanja cukai tersebut, pelaku hobi semestinya bisa mengklaim penerimaan cukai yang terkumpul. Namun lagi-lagi, menjadi kecemburuan besar jika pelaku hobi, yang notabene-nya sudah kaya, justru dikover oleh hasil cukai. Persepsi eksklusivitas terhadap hobi tersebut kian kuat menancap.

Alhasil, konfigurasi problematika di atas menjadi potret kecil ketidaksinkronan antara tujuan yang hendak dicapai dengan cara yang ditempuh. Ketidaksinkronan senantiasa mengundang polemik sehingga bisa jadi malah alpa bertindak nyata menanggulangi inti persoalan yang ada di dalamnya. Bukan begitu?

(Penulis adalah Guru Besar Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta, Anggota Focus Group Bidang Fiskal dan Keuangan Negara PP ISEI)-d

Bank

yang ditentukan," kata Dian.

Lebih lanjut Dian mengungkapkan, keberhasilan Bank BPD DIY dalam meningkatkan kinerjanya tidak lepas dari dukungan seluruh pegawai dalam menjalankan langkah-langkah strategis yang disusun, sehingga Bank BPD DIY mampu menghadapi dan menjawab berbagai tantangan. Digitalisasi produk dan layanan serta proses bisnis yang terus dilakukan Bank BPD DIY diharapkan mampu mendorong pertumbuhan bisnis perseroan dengan lebih cepat lagi. Selain itu, peningkatan kualitas produk dan layanan, kolaborasi serta sinergi dengan berbagai pihak dalam membangun ekosistem digital juga tetap dijaga dengan baik.

Hingga Juli 2024, aset Bank BPD DIY mencapai Rp 19,94 triliun atau tum-

buh 13,7 persen secara year on year (yoy) dengan total Dana Pihak Ketiga (DPK) yang berhasil dihim-pun sebesar Rp 14,46 triliun, tumbuh 8,7 persen

mentara untuk penyaluran kredit pada Juli 2024 tercatat sebesar Rp 10,73 triliun tumbuh 12,0 persen year on year. (Rsv)-d



Prakiraan Cuaca 30 Agustus 2024

| Lokasi | Pagi | Siang | Cuaca Malam | Diri Hari | Suhu C | Kelembaban |
|------------|------|-------|-------------|-----------|--------|------------|
| Bantul | | | | | 22-30 | 65-95 |
| Sieman | | | | | 22-29 | 65-95 |
| Wates | | | | | 22-29 | 65-95 |
| Wonosari | | | | | 22-30 | 65-95 |
| Yogyakarta | | | | | 22-30 | 65-95 |

Anggrismo, S.E., M.Sc. Dev
Dosen Prodi Informatika Universitas Amikom Yogyakarta

BADAN Pusat Statistik (BPS) telah mencatat tren penurunan yang mengkhawatirkan dalam jumlah kelas menengah di Indonesia sejak tahun 2019. Kelas menengah, yang didefinisikan berdasarkan pengeluaran per kapita per bulan, saat ini cenderung

Penurunan Kelas Menengah di Indonesia

berada di batas bawah kategori ini. Fenomena ini menunjukkan bahwa mereka rentan terhadap penurunan status ekonomi dan menghadapi kesulitan untuk naik ke kelas yang lebih tinggi.

Kelas menengah dan mereka yang sedang menuju kelas menengah memiliki peran yang sangat penting dalam perekonomian. Mereka tidak hanya mewakili sebagian besar populasi, tetapi juga berkontribusi secara signifikan terhadap konsumsi nasional. Daya beli mereka yang kuat menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, penurunan jumlah kelas menengah ini perlu ditanggapi dengan serius dan memerlukan solusi yang tepat.

Ada beberapa faktor yang berkontribusi terhadap penurunan kelas menengah di Indonesia. Salah satunya adalah kenaikan harga barang dan jasa, terutama kebutuhan pokok, yang mengurangi daya beli masyarakat kelas menengah. Kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang akan datang juga diperkirakan akan semakin menekan konsumsi mereka. Selain itu, ketimpangan pendapatan yang tinggi, di mana sebagian besar kekayaan terkonsentrasi pada segelintir orang, mempersulit kelas menengah untuk meningkatkan pendapatan mereka.

Penurunan kelas menengah dapat menimbulkan dampak negatif yang luas terhadap perekonomian secara keseluruhan. Salah satu dampak yang paling terasa adalah penurunan konsumsi. Ketika daya beli kelas menengah menurun, mereka secara otomatis mengurangi pengeluaran mereka, yang berdampak pada pertumbuhan ekonomi nasional.

Solusi dari Perspektif Ekonomi Syariah

Sistem ekonomi syariah menawarkan solusi yang komprehensif untuk mengatasi permasalahan penurunan kelas menengah dan melindungi ekonomi warga. Perilaku konsumsi warga adalah sesuatu yang akan sangat terkendali menurut kacamata syariat Islam agar mereka jangan sampai terperosok dalam kategori konsumtif. Pemborosan sangat dicela oleh Islam. Allah Taala berfirman, "Dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros. Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara setan dan setan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya." (QS Al-Isra [17]: 26-27). Namun sebaliknya, sistem kapitalisme justru sangat mendorong aktivitas konsumtif, bahkan cenderung pada pemborosan, karena hal itu adalah sumber profit bagi para kapitalis.

Penerapan sistem ekonomi syariah adalah solusi mendasar bagi perlindungan ekonomi warga. Di satu sisi, warga negara tidak akan dikotak-kotakkan berdasarkan kelas ekonominya, alih-alih mengharuskan warganya berstatus penerima subsidi dan nonsubsidi. Sudah menjadi tanggung jawab negara untuk menjamin ketersediaan dan pemenuhan kebutuhan warganya secara

UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA
Creative Economy Park

berkelanjutan. Sistem ini akan melindungi dan memperkuat kelas menengah, memastikan kesejahteraan yang lebih merata bagi seluruh masyarakat, dan mengurangi ketergantungan pada pertumbuhan ekonomi semata sebagai indikator kesejahteraan.

Dalam sistem ekonomi syariah, fokusnya adalah pada pembangunan manusia seutuhnya, bukan hanya pada akumulasi kekayaan. Dengan demikian, diharapkan dapat tercipta masyarakat yang lebih sejahtera, adil, dan harmonis, di mana setiap individu memiliki kesempatan untuk mencapai potensi maksimal mereka. Wallahuallah bissawab***